

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu perlu direview untuk mengetahui masalah, isu-isu, dan informasi apa saja yang dibahas oleh penelitian terdahulu berkaitan dengan judul yang akan dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti menemukan bahwa telah ada penelitian yang meneliti tentang variable yang dapat dijadikan acuan untuk dipelajari dan dipahami lebih dalam lagi. Berikut akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu mengenai integritas laporan keuangan.

Pertama dilakukan oleh Dewi dan Putra (2016). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* pada integritas laporan keuangan. Mekanisme *corporate governance* di proksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komisaris independen dan komite audit, sedangkan variabel integritas laporan keuangan diukur dengan indeks konservatisme. Integritas laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan yang wajar, jujur dan tidak bias. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 dan menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 72 amatan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi nonpartisipan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen dan komisaris independen berpengaruh positif pada integritas laporan keuangan, sedangkan komite audit tidak berpengaruh pada integritas laporan keuangan.

Kedua dilakukan oleh Indrasari *et al.*, (2016). Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas tentang pengaruh komisaris independen, komite audit dan *financial distress* terhadap integritas laporan keuangan pada perusahaan *property*

dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia baik secara parsial maupun simultan pada tahun 2005-2014. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi data panel dengan bantuan program komputer Eviews versi 8.0. hasil penelitian secara parsial pada tahun 2005-2014 menunjukkan bahwa hanya komisaris independen yang memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sementara komite audit dan *financial distress* tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Sedangkan secara simultan, variabel komisaris independen, komite audit dan *financial distress* secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Disarankan untuk penelitian berikutnya untuk menambah variabel independen baru yang diprediksi dapat berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan seperti independensi dan kualitas auditor dan mekanisme *good corporate governance*.

Ketiga dilakukan oleh Qoyyimah *et al.*, (2015). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tata kelola perusahaan, masa kerja audit, dan ukuran KAP terhadap integritas laporan keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistik. Sampel penelitian terdiri dari 14 perusahaan milik negara yang terdaftar di BEI 2011-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas laporan keuangan tidak dapat dikendalikan dengan tata kelola perusahaan, masa audit dan ukuran KAP.

Keempat dilakukan oleh Alwijaya *et al.*, (2019). Integritas laporan keuangan pada sektor perusahaan transportasi banyak yang dibawah standar ketentuan dari BEI dan banyak sektor transportasi yang tidak terdaftar di BEI. Integritas laporan keuangan (variabel dependent) dianalisis dengan variabel independent yang terdiri dari x_1 = ukuran Direksi, x_2 = Proporsi Komisaris Independen (PKI), x_3 = Komite Audit (KA) dan x_4 = Kepemilikan Instutisional (KI). Nilai hasil regresi uji F sebesar 2,475 dengan signifikan sebesar 0,05, sedangkan uji t nya hanya kepemilikan instutisional yang berpengaruh yaitu 3,035 dan signifikan 0,03 berarti semakin banyak jumlah kepemilikan instutisional, maka integrasi laporan keuangan akan semakin baik.

Kelima dilakukan oleh Istiantoro *et al.*, (2017). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari struktur corporate governance terhadap integritas laporan keuangan perusahaan pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2009-2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 18 perusahaan dengan menggunakan kriteria lewat metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik dan regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS 19.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan, kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan, komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap integritas laporan keuangan, komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Keenam dilakukan oleh Daoud *et al.*, (2015). Studi ini mengeksplorasi pengaruh independensi dewan, ukuran dewan, dualitas CEO, ketekunan dewan, keahlian keuangan dewan dan kehadiran komite audit serta jenis sektor pada ketepatan waktu laporan keuangan di antara orang-orang Yordania yang dipilih perusahaan. Ketepatan waktu laporan keuangan diukur dengan lag laporan audit (ARL) dan lag laporan manajemen (MRL). Studi ini mencakup 112 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Amman untuk tahun 2011 dan 2012. Hasil model ARL menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki anggota dewan yang independen dari manajemen memerlukan waktu yang jauh lebih singkat untuk menyiapkan dan menerbitkan laporan keuangan mereka. Hasil menunjukkan bahwa perusahaan dengan jumlah dewan direksi lebih besar terkait dengan keterlambatan laporan audit yang lebih tinggi. Hasil juga menunjukkan bahwa perusahaan yang memisahkan peran CEO dan ketua adalah lebih cepat dalam menerbitkan laporan keuangan daripada perusahaan yang menggabungkan peran CEO dan ketua. Selain itu, dewan direktur dengan lebih banyak rapat membuat laporan audit lebih singkat. Temuan itu juga mendukung argumen bahwa keberadaan seorang komite audit dapat menyelesaikan asimetri informasi antara manajemen dan auditor eksternal yang, pada gilirannya, akan memimpin untuk mengurangi keterlambatan laporan audit dan keterlambatan laporan manajemen. Namun, hasil model MRL

menunjukkan bahwa laporan manajemen lag berhubungan positif dengan ukuran dewan besar dan ketekunan dewan dan negatif terhadap keberadaan komite audit. Pelajaran ini menyimpulkan bahwa struktur tata kelola perusahaan yang baik memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas ketepatan waktu keuangan laporan.

Ketujuh dilakukan oleh Kantudu *and* Samaila (2015). Studi ini meneliti dampak karakteristik pemantauan terhadap kualitas pelaporan keuangan perusahaan pemasaran minyak Nigeria. Kualitas pelaporan keuangan diwakili dengan karakteristik kualitatif dari laporan keuangan. Data untuk penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan yang diaudit dan akun dari perusahaan pemasaran minyak sampel selama dua belas tahun yang meliputi tahun 2000 hingga 2011. Regresi berganda digunakan untuk menganalisis data menggunakan Stata versi 12.0. Ditemukan bahwa pemisahan Daya, direktur independen, kepemilikan saham manajerial, dan komite audit independen semuanya memiliki karakteristik pemantauan signifikan yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan perusahaan pemasaran minyak yang dikutip di Nigeria. Juga, ukuran variabel kontrol yang diukur log natural dari total aset secara signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan perusahaan pemasaran minyak di Nigeria. Direkomendasikan bahwa pengangkatan direktur independen di dewan perusahaan harus didasarkan pada catatan sebelumnya dari para direktur dalam hal kinerja daripada menekankan pada proporsi terhadap jumlah total direktur di dewan.

Kedelapan dilakukan oleh Onuorah et al., (2016). Makalah ini mengevaluasi tingkat kinerja beberapa perusahaan yang dipilih mulai dari komoditas, tempat pembuatan bir, perbankan, minyak dan gas dan minuman dalam hal indikator tata kelola perusahaan menunjukkan kualitas perusahaan pelaporan keuangan di Nigeria. Data dikumpulkan dari 2006 hingga 2015. Analisis ekonometrik dilakukan dan hasilnya menunjukkan bahwa korelasi antara indikator tata kelola perusahaan struktur dewan (ukuran-BRDSZ dan independensi-BRDID), kualitas audit (ukuran komite audit (ADCMZ), kualitas audit eksternal (EADTQ) sebagai diukur dengan kehadiran auditor di antara big-4), pengalaman dewan (yaitu pengalaman-BRDEX) dan keuangan kualitas pelaporan adalah 93,47%. Variabel independen dapat

menjelaskan variasi dalam FRQDA sebesar 54,29%. Ada signifikansi keseluruhan di antara parameter yang mengukur kualitas pelaporan keuangan sebagai akrual diskresioner perusahaan (FRQDA). Struktur dewan (ukuran-BRDSZ), pengalaman dewan (pengalaman-BRDEX) dan kualitas audit eksternal (EADTQ) memiliki dampak positif pada kualitas pelaporan keuangan yang diukur oleh akrual diskresioner perusahaan (FRQDA) oleh 16,01, 0,05 dan 2,75. Namun, direktur independen di dewan perusahaan (independensi-BRDID) dan kualitas audit (ukuran komite audit (ADCMZ) berpengaruh negatif terhadap kualitas pelaporan keuangan yang diukur oleh *discretionary accruals of firm* (FRQDA) sebanyak 0,99 dan 20,01. Bank Trust Trust Plc. di antara lima yang dipilih perusahaan studi di Nigeria memiliki kinerja pelaporan keuangan yang lebih baik berdasarkan pada struktur dewan (ukuran-BRDSZ) dan ukuran komite audit (ADCMZ). Ini mengungkapkan bahwa ada hubungan jangka pendek antara kualitas Audit (audit) ukuran komite (ADCMZ), dan kualitas audit eksternal (EADTQ) yang diukur dengan keberadaan auditor di antara big-4) dan *board experience* (yaitu *experience-BRDEX*) belum memahami penyebab FRQDA. Lebih jauh merekomendasikan agar fokus yang lebih besar pada indikator tata kelola perusahaan untuk menghasilkan keuangan standar global melaporkan di pasar berkembang Nigeria untuk peluang investasi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Good Corporate Governance

Menurut Franita (2018: 10) *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem yang mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai saham, yang akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada *shareholders* tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* yang meliputi karyawan, kreditur, dan masyarakat.

Secara umum terdapat lima prinsip dalam penerapan *Good Corporate Governance* (KNKG:2010), yaitu:

1. Transparansi (*Transparency*)

Perusahaan diuntut untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai bukti kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat.

4. Kemandirian (*Independency*)

Perusahaan dituntut untuk dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan maupun pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang bertentang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran dan kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Dalam pedoman umum *Good Corporate Governance* (KNKG:2010) memaparkan bahwa organ perusahaan terdiri dari :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

2. Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional.
3. Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

2.2.2. Kepemilikan Institusional

Baridwan (2014) mendefinisikan kepemilikan institusional sebagai proporsi saham yang dimiliki oleh suatu lembaga atau institusi. Kepemilikan saham ditunjukkan dengan persentase jumlah saham perusahaan yang dimiliki investor institusi. Kehadiran kepemilikan institusional memiliki peran yang penting karena kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen. Pengawasan atas tata kelola perusahaan oleh pihak investor institusional diharapkan dapat mendorong pihak manajemen untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga akan mengurangi perilaku manajemen untuk melakukan kecurangan dan mengabaikan kepentingan pihak-pihak lain terutama pihak yang berasal dari luar perusahaan. Investor institusional atau pemegang saham dari luar perusahaan diharapkan mampu mengurangi *agency cost* dengan melakukan pengawasan secara efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan investor institusional mewakili sumber kekuasaan yang mampu digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kedudukan pihak manajemen.

Semakin tinggi kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga lain yang berasal dari luar perusahaan maka pengawasan terhadap perusahaan akan semakin

tinggi, sehingga mampu mengurangi dan mencegah perilaku manajemen untuk melakukan praktik *windows dressing* atas laporan keuangan. Dengan demikian, manajemen perusahaan akan selalu berupaya menyajikan laporan keuangan dengan informasi yang memiliki integritas tinggi dan tidak menyesatkan pemakainya ketika dalam proses pengambilan keputusan.

2.2.3. Kepemilikan Manajerial

Menurut Wati (2019:25) Kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Kepemilikan saham manajerial dapat membantu menyatukan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, yang berarti semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab manajemen yang lebih besar dalam menjalankan amanah untuk mengelola perusahaan.

Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Dengan meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik kepada perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya karena manajemen mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi keinginan dari pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri.

2.2.4. Komisaris Independen

Menurut Franita (2018:12) dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, megawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan.

Terkait peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam peraturan tersebut dipaparkan bahwa perusahaan publik wajib memiliki dewan komisaris minimal dua orang anggota, dimana salah satunya adalah komisaris independen. Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai emiten atau perusahaan public maupun usaha emiten atau perusahaan publik, dan memberi nasihat kepada direksi.

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Oleh karena itu, komisaris independen merupakan posisi yang terbaik guna melaksanakan fungsi pengawasan agar menciptakan perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik.

Komisaris independen harus memiliki sifat integritas dan independensi yang kuat sehingga tidak mudah untuk dipengaruhi oleh pihak manajemen dan tugas pengawasan yang dilakukannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan memiliki komisaris independen maka diharapkan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen memiliki integritas yang tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga tidak menyesatkan para pemakai dalam proses pengambilan keputusan.

2.2.5. Komite Audit

Menurut Nurhaiyani (2018) komite audit merupakan penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak eksternal lainnya. Badan ini bertugas untuk membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, demikian komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi kecurangan dalam penyajian laporan keuangan sehingga komite audit diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap Tindakan manajemen yang memungkinkan untuk melakukan manipulasi terhadap laporan keuangan

Komite audit juga memiliki wewenang untuk dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan dan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenang, komite audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit. Dengan adanya komite audit sebagai pengawas diharapkan mampu mengurangi perilaku manajemen yang bersifat *opportunistic* dan memiliki motivasi untuk melakukan praktik kecurangan.

2.2.6. Ukuran Perusahaan

Menurut Verya (2017) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total asset, penjualan dan kapitalisasi pasar. Ketiga pengukuran tersebut sering digunakan untuk mengidentifikasi besar kecilnya suatu perusahaan karena semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar modal yang ditanam. Semakin besar penjualan, maka semakin besar pula perputaran uang dalam perusahaan tersebut, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka perusahaan tersebut semakin dikenal oleh masyarakat.

Menurut Halim (2015:125) semakin besar ukuran perusahaan, maka kecenderungan menggunakan modal asing juga semakin besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula untuk menunjang operasionalnya dan salah satu alternatif pemenuhan adalah modal asing apabila dengan modal sendiri tidak cukup.

2.2.7. Integritas Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur.

Menurut Alwijaya et al., (2019) integritas laporan keuangan laporan keuangan yang menampilkan kondisi suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Oleh karena itu, informasi yang memiliki integritas yang tinggi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan untuk membantu keputusan.

Laporan keuangan yang *reliable* atau berintegritas dapat dinilai dengan penggunaan prinsip konservatisme. Konservatisme adalah prinsip dalam pelaporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur aktiva dan laba yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomi dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian. Konsep konservatisme merupakan konsep tradisional, dimana Ketika kerugian tersebut akan langsung diakui meskipun belum terealisasi. Akan tetapi, Ketika keuntungan terjadi maka keuntungan yang belum terealisasi tidak akan diakui.

Manipulasi yang paling sering dilakukan adalah *overstate* laba. Hal ini karena laba dapat mencerminkan kinerja operasional perusahaan dan menjadi perhatian bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai perusahaan. Kinerja perusahaan akan mempengaruhi harga saham, sehingga menjadi alasan tambahan bagi manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan apabila tidak mampu mencapai apa yang diinginkan. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menghindari manipulasi laporan keuangan adalah dengan menggunakan prinsip konservatif.

2.3. Hubungan Antar Variabel

2.3.1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap integritas laporan keuangan.

Kepemilikan saham oleh institusi atau lembaga lainnya yang berasal dari luar perusahaan merupakan salah satu mekanisme pengawasan dalam pengelolaan perusahaan. Dengan adanya investor-investor institusional diharapkan mampu mengurangi *agency cost*, sehingga mampu mendorong pihak manajemen untuk tidak melakukan praktik kecurangan. Kepemilikan institusional yang besar diasumsikan akan mampu menjadi pengawas yang efektif bagi manajemen dalam menyajikan laporan keuangan, sehingga informasi yang disajikan bebas dari salah saji material yang dapat menyesatkan pemakainya. Hasil penelitian Dewi dan Putra (2016), Alwijaya et al., (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

2.3.2. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap integritas laporan keuangan.

Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk didalamnya persentase saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun dimiliki oleh anak cabang perusahaan yang bersangkutan beserta afiliasinya.

Kepemilikan Manajerial merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring* agar tercipta perusahaan yang memenuhi *good corporate governance*, semakin tinggi persentase kepemilikan manajerial akan meningkatkan keintegritasan laporan keuangan. Hasil penelitian Dewi dan Putra (2016), Istiantoro *et al.*, (2017). menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

2.3.3. Pengaruh komisaris independen terhadap integritas laporan keuangan.

Keberadaan komisaris independen dalam jajaran dewan komisaris diharapkan mampu menjadi penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan dalam rangka memberikan perlindungan atas hak-hak dari pemegang saham minoritas dan pihak pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan memiliki komisaris independen diasumsikan menjadi pengawas yang mampu mencegah manajemen untuk melakukan praktik kecurangan, sehingga laporan keuangan yang disajikan memiliki integritas yang tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan keandalannya. Hasil penelitian Dewi dan Putra (2016), Indrasari *et al.*, (2016) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

2.3.4. Pengaruh komite audit terhadap integritas laporan keuangan.

Keberadaan komite audit dalam sebuah perusahaan diharapkan akan menjadi salah satu cara untuk mengurangi dan mencegah perilaku manajemen yang bersifat *opportunistic* dan memiliki motivasi untuk melakukan praktik kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan. Komite audit harus memiliki sifat independensi yang kuat sehingga mampu mengawasi tindakan manajemen dengan efektif dan memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan kegiatan operasional sesuai peraturan perundang-undangan, kaidah dan norma yang berlaku. Sehingga laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen memiliki integritas yang tinggi dan tidak memberikan informasi yang menyesatkan bagi pemakainya. Hasil penelitian Istiantoro *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan.

2.3.5. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap integritas laporan keuangan.

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total asset, penjualan dan kapitalisasi pasar. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kelengkapan integritas laporan keuangannya. Perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih banyak mengungkapkan butir-butir laporan keuangannya karena mereka memiliki lebih banyak informasi yang lebih banyak diungkapkan. Hasil penelitian Fajar dan Nubaiti (2020) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Menurut Anshori dan Iswati (2017:46) Hipotesis merupakan pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenaran sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja serta panduan dalam verifikasi. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan landasan teori di atas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan (Dewi dan Putra, 2016). Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Kehadiran Kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan manipulasi data dan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Berdasarkan paparan diatas maka hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H₁ : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan (Dewi dan Putra, 2016). Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak internal atau manajemen yang sekaligus pengelolaan perusahaan, sehingga dalam menjalankan tanggungjawabnya akan cenderung melakukan hal yang terbaik. Adanya kepemilikan manajemen ini akan

meningkatkan keseimbangan informasi antara pemegang saham dan manajemen, sehingga mampu mengurangi masalah yang ditimbulkan dalam *agency theory*. Menurut teori ini, permasalahan anatar principal dan agen ini dapat dikurangi dengan mensejajarkan kepentingan keduanya. Berdasarkan paparan diatas maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H₂ : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Komisaris independen memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan (Dewi dan Putra, 2016). Komisaris independen adalah bagian dari komisaris yang bersifat independent dan bertindak untuk kepentingan perusahaan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen akan cenderung berintegritas dengan keberadaan komisaris independen didalamnya, karena bagian ini berfungsi mengawasi manajemen dan melindungi hak-hak diluar perusahaan. Berdasarkan paparan diatas maka hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H₃ : Komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Komite audit memiliki pengaruh terhadap integritas laporan keuangan (Istiantoro et al., 2017). Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting dalam *corporate governance*. Komite audit harus terdiri dari individu-individu yang mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, dan yang memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Sesuai dengan fungsi dan tujuan dibentuknya komite audit, yang salah satunya yaitu memastikan laporan keuangan yang dihasilkan tidak menyesatkan, maka sedikit banyak keberadaan dan efektivitas komite audit dalam perusahaan berpengaruh terhadap kualitas dan integritas laporan keuangan yang dihasilkan. Berdasarkan paparan diatas maka hipotesis keempat penelitian ini adalah:

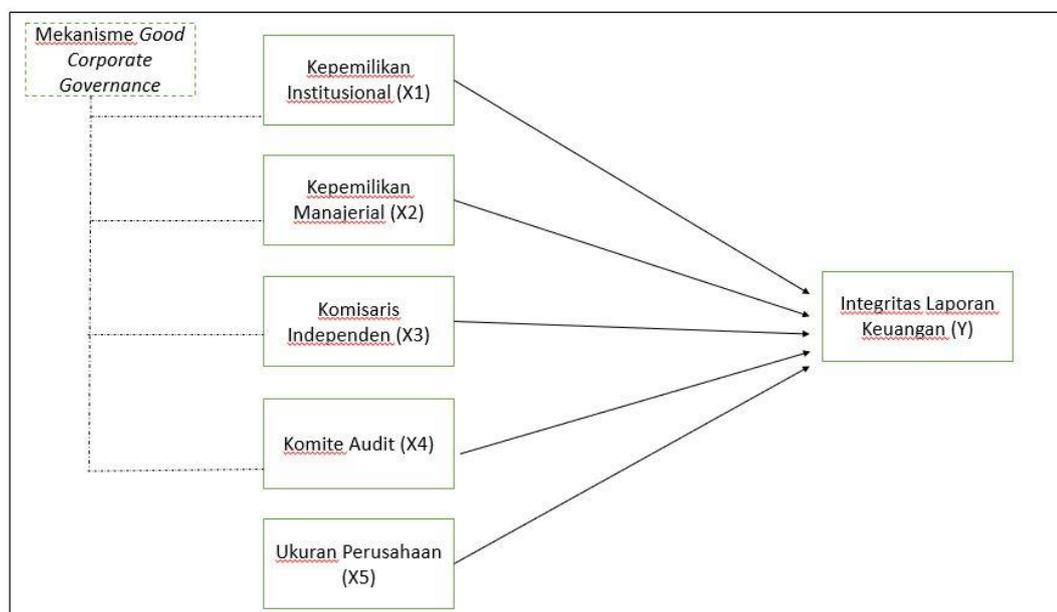
H₄ : Komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Ukuran perusahaan dapat tercermin dari total asset yang dimiliki oleh perusahaan (Putra dan Iestari, 2016). Hal ini akan membuat investor mempertimbangkan ukuran perusahaan sebelum menanamkan modalnya, karena perusahaan yang besar dianggap telah berkembang dan memiliki kinerja yang baik. Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikasi dalam mengukur kinerja suatu perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar dapat mencerminkan jika perusahaan mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus meningkatkan kinerjanya, sehingga pasar akan membayar lebih mahal untuk mendapatkan sahamnya karena akan mendapatkan pengembalian yang menguntungkan dari perusahaan tersebut. Berdasarkan paparan di atas maka hipotesis kelima penelitian ini adalah:

H₅ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Ukuran Perusahaan dengan integritas laporan keuangan pada perusahaan Perbankan.



Landasan Teori	Penelitian Terdahulu
<p>Baridwan (2014)</p> <p>kepemilikan institusional sebagai proporsi saham yang dimiliki oleh suatu lembaga atau institusi. Kepemilikan saham ditunjukkan dengan persentase jumlah saham perusahaan yang dimiliki investor institusi.</p>	<p>Dewi dan Putra (2016)</p> <p>Dengan adanya kepemilikan institusi maka akan ada yang mendorong pengawasan terhadap kinerja manajemen, karena pemegang saham institusi memiliki kemampuan dan professional yang baik dalam menilai suatu laporan yang disajikan.</p> <p>Alwijaya et al., (2019)</p> <p>Kepemilikan institusional memiliki Kepemilikan institusi akan memiliki pengaruh pada biaya keagenan dan konsekuensinya berdampak pada kebijakan pembayaran dividen.</p>
<p>Wati (2019)</p> <p>para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan.</p>	<p>Dewi dan Putra (2016)</p> <p>Manajemen memegang peranan sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, sehingga dalam menjalankan tanggungjawabnya akan cenderung melakukan hal yang terbaik.</p> <p>Istiantoro et al., (2017)</p> <p>Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka manajemen akan lebih giat untuk meningkatkan kinerjanya .</p>
<p>Franita (2018)</p> <p>Dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi</p>	<p>Dewi dan Putra (2016)</p> <p>Dengan adanya komisaris independen sebagai pihak independen yang mengawasi kinerja manajemen, maka</p>

<p>perusahaan, megawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.</p>	<p>laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin berintegritas.</p> <p>Indrasari et al., (2016)</p> <p>Keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan dapat mempengaruhi integritas suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen, karena di dalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi secara langsung dan melindungi hak pihak-pihak minoritas diluar manajemen perusahaan.</p>
<p>Nurhaiyani (2018)</p> <p>komite audit merupakan penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak eksternal lainnya.</p>	<p>Istiantoro et al., (2017)</p> <p>Dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan, maka proses pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor dengan baik.</p>
<p>Verya (2017)</p> <p>ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total asset, penjualan dan kapitalisasi pasar.</p>	<p>Fajaryani (2015)</p> <p>Banyaknya sorotan baik oleh pasar maupun public terhadap perusahaan besar terbukti mampu mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara jujur sehingga mencerminkan laporan keuangan berintegritas</p>